

KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH

Asep Dedy Sutrisno

Universitas Pasundan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
sister.asepdedysutrisno@unpas.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Komitmen pemerintah sangat penting untuk pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Komitmen pemerintah. Terwujudnya Ketahanan Pangan merupakan hasil interaksi dari semua subsistem atau komponen ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya, merupakan upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program peningkatan ketahanan pangan. 1. Sistem Ketahanan Pangan bagi suatu daerah merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, yang pada gilirannya merupakan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.

Kata Kunci: Kebijakan, Sistem Ketahanan Pangan, Daerah.

ABSTRACT

Law No. 18 of 2012 on food. Food sovereignty is defined as the right of the state and the nation that independently determine the food policies that guarantee the right to food for the people and which give the right for communities to determine the food system in accordance with the potential of local resources. Food self-sufficiency is defined as the ability of the state and the nation in producing food that is diverse in the country that can guarantee the fulfillment of food needs quite up the level of the individual by utilizing the potential of natural resources, human, social, economic, and local wisdom with dignity. The government and the Regional Government in accordance with its authority is obliged to build, compile, and develop the Information System of the Food and Nutrition are integrated. The commitment of the government is very important for the development of food security and nutrition. The commitment of the government. The realization of Food security is the result of the interaction of all subsystems or components of food availability, distribution of food and food consumption. the provision of food in accordance with the nutritional needs of the population both in quantity and quality, is the effort that must be implemented in order to realize the program to improve food security. 1. The system of Food security for an area is a mandatory thing held as a concern for the Local Government to the community, which in turn is the development of human resources who are healthy, intelligent, active, and productive.

Keywords: Policy, The System of Food security, Area.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang sangat penting dan bersifat urusan wajib. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan

bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi.

Indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi ini dibuat untuk memenuhi tujuan dari ketahanan pangan dan gizi. Menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015, ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya pangan dan gizi dari cakupan negara sampai individu yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, memenuhi kebutuhan gizi, merata serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya untuk mencapai status gizi normal demi hidup yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dan gizi merupakan suatu hal yang kompleks yang menghubungkan antara pertanian, pangan, gizi, kesehatan, dan sistem lingkungan. Ketahanan pangan dan gizi harus memenuhi tiga aspek utama yaitu ketersediaan, akses (fisik dan ekonomi), dan pemanfaatan atau konsumsi. Upaya evaluasi ketahanan pangan dan gizi terus dilakukan melalui pengembangan indeks seperti FAO index, Global Hunger Index (GHI), Global Food Security Index (GFSI), Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Rice Bowl Index, Hunger and Nutrition Security Index (HANCI), dan sebagainya. Masing-masing indeks memiliki karakteristik yang berbeda. FAO index dan GHI mengukur kelaparan dunia, FSVA memetakan kerawanan pangan di Indonesia dengan skala wilayah pedesaan, GFSI mengukur ketahanan pangan dan gizi, dan HANCI mengukur komitmen tiap negara terhadap pangan dan gizi.

FAO menyatakan bahwa evaluasi ketahanan pangan dan gizi dapat menggunakan tiga indikator yaitu indikator struktural, proses, dan outcome. Indikator struktural ketahanan pangan dan gizi menggambarkan komitmen suatu negara atau provinsi untuk menangani permasalahan ketahanan pangan dan gizi. Mayoritas indeks mengevaluasi ketahanan pangan dan gizi dari segi outcome kecuali HANCI yang mengevaluasi komitmen pemerintah terhadap penanganan masalah pangan dan gizi. Komitmen pemerintah sangat penting untuk pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Komitmen pemerintah terdiri dari peraturan dan kebijakan yang dibangun dan diproses untuk diimplementasikan dalam bentuk program serta memiliki anggaran dalam pelaksanaannya. HANCI dapat mengevaluasi komitmen suatu negara namun kurang relevan jika diimplementasikan ke wilayah regional. Ukuran evaluasi dalam HANCI bersifat global dan terdapat beberapa komponen penilaian yang tidak dapat diaplikasikan untuk wilayah provinsi. HANCI perlu dikembangkan agar dapat mengevaluasi komitmen pemerintah daerah terutama untuk negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi seperti Indonesia. Desentralisasi menyebabkan tiap daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur urusan daerahnya termasuk dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.^{9,10} Hal ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah akan berimplikasi terhadap implementasi suatu program termasuk program pangan dan gizi. ^{11,12}Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengembangan metode dengan indikator yang mampu mengukur komitmen politik pemerintah yang dalam studi ini fokus pada pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain metode deskriptif, yaitu penulisan yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, data yang di kumpulkan di susun, dijelaskan dan dianalisis. Pemilihan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan sifat dan masalah, serta tujuan peneliti yang ingin diperoleh gambaran yang nyata peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

PEMBAHASAN

Landasan Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi, serta regulasi-regulasi lainnya yang juga diperkuat dengan tatanan konsep internasional melalui Food Agriculture Organization (FAO) merupakan landasan program pembangunan Ketahanan Pangan baik di tingkat Nasional, Provinsi, ataupun Kabupaten / Kota. Terwujudnya Ketahanan Pangan merupakan hasil interaksi dari semua subsistem atau komponen ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Subsistem ketersediaan antara ekspor dan import. Ketersediaan Pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta stabilnya penyediaannya dari waktu ke waktu. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Hal ini bukan hanya berarti pangan tersedia disemua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan dari segi ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Subsistem konsumsi mencakup upaya peningkatan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan kebutuhan pangan/ gizi bagi setiap individu. Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting lain yaitu aspek diversifikasi pangan. Aspek ini merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi, sekaligus melepaskan ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu yaitu beras.

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk serta sesuai dengan persyaratan gizi selalu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan dan merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah manusia. Pertanyaan yang timbul “apakah produksi pangan akan mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan karena penambahan penduduk?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu yang dapat disiapkan dengan tepat, teliti dan mudah di pahami serta sekaligus dapat mengetahui gambaran mengenai produksi, pengadaan, dan penggunaan pangan, serta tingkat konsumsi penduduk per kapita. Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan berdampak pada social, keamanan, dan ekonomi. Besarnya penyediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor, adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan. Seperti kita maklumi, pangan sebagai sumber zat gizi bagi makhluk hidup umumnya dan manusia khususnya, merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Kedudukan pangan bagi masyarakat dapat di pandang sebagai salah satu komoditas yang strategis karena erat kaitannya dengan masalah Ketahanan Nasional.

Usaha-usaha penyediaan pangan bagi penduduk telah di laksanakan oleh pemerintah melalui program ketahanan pangan yang kegiatannya antara lain intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi produksi pertanian. Analisa dari gambaran dari pengadaan tersebut bila dibandingkan dengan kebutuhannya menurut persyaratan gizi merupakan bahan yang sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan pangan secara menyeluruh agar berkesinambungan antara penyediaan pangan, penggunaan pangan, pendapatan masyarakat. dan pendapatan Negara. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, regional, dan nasional. Berbagai level ketersediaan pangan tersebut merupakan prasyarat terwujudnya konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas. Namun demikian penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya, merupakan upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program peningkatan ketahanan pangan. Indikator ketahanan pangan suatu negara, provinsi, hingga kabupaten / kota dapat menggunakan metode pengukuran Indeks Ketahanan Pangan/IKP (Food Security Index) dan ketersediaan pangan Neraca Bahan Makanan (NBM) atau Food Balance Sheet (FBS) pada periode tertentu.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

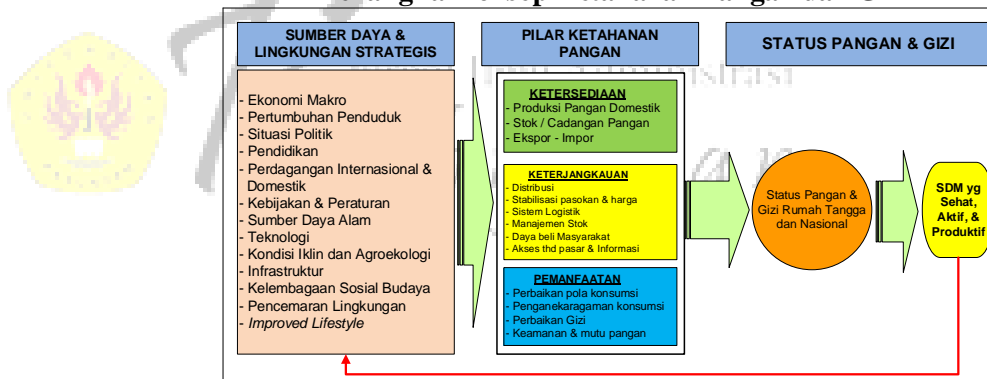
Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2020 menyusun IKP Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota sebagai pemutakhiran IKP 2019 dan untuk melengkapi penyusunan IKP 2020 disusun juga unit analisis tingkat provinsi. Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (Global Food Security Index - GFSI) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (Gambar 1). Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar menggunakan angka tetap 2019 dari BPS dan Kementerian Pertanian.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiaty 2009; dan Misselhorn 2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2019, BPS.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2019, BPS.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2019, BPS.
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2019, BPS.
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan dan Gill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomas dan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas 2019, BPS.
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2019, Kementerian Kesehatan.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat

baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT et al. 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, Kementerian Kesehatan.

9. Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2019, BPS.

Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI (EIU 2018 dan 2019) dan GHI (IFPRI 2018 dan 2019). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui expert judgement (Tabel 1). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement

NO	INDIKATOR	BOBOT
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30
SUB TOTAL		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,15
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
SUB TOTAL		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8	Prevalensi balita stunting	0,05
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
SUB TOTAL		0,40

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 aiXij$$

i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9

j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98

Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j

ai : Bobot masing-masing indikator ke-i

Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan

Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP (Tabel 3). Cut off point IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 2. Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

KELOMPOK IKP	KABUPATEN	KOTA	PROVINSI
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
2	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menempati urutan ke 14, yaitu dengan nilai IKP 76,78. Sedangkan urutan pertama ditempati oleh Provinsi Bali dengan nilai IKP 84,54, kedua Jawa Tengah dengan nilai IKP 82,31, dan ketiga Sulawesi Selatan dengan nilai IKP 81,81. Berdasarkan analisis IKP pada tahun 2020, maka Jawa Barat perlu meningkatkan lagi nilai IKP nya hingga meningkat dari skor 76,78.

NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimaksudkan untuk mengetahui data dan informasi tentang situasi dan keadaan ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi manusia dalam kurun waktu tertentu. NBM Nasional disusun setiap tahun dengan mengacu pada metode yang disusun oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada. Data yang digunakan untuk menyusun NBM berasal dari instansi terkait yang telah dipublikasikan secara resmi, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pangan, serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

NBM merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah impor dan dikurangi dengan jumlah ekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang

tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita pertahun serta dalam gram per kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari dikonversi ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

Neraca Bahan Makanan disusun bertujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi. NBM bermanfaat untuk:

- (i) bahan evaluasi tentang pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012;
- (ii) Untuk penyusunan pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan;
- (iii) bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan;
- (iv) bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi;
- (v) bahan referensi bagi pemerhati pangan dan gizi.

1. Komponen Penyusun NBM

NBM terdiri atas 20 kolom dari sebelumnya 19 kolom. Penambahan satu kolom penggunaan lainnya dimaksudkan untuk menampung besarnya penggunaan pangan yang belum diketahui besarnya karena data tidak tersedia. Dari 20 kolom tersebut terbagi menjadi tiga kelompok penyajian yaitu penyediaan/pengadaan, penggunaan/pemanfaatan dan ketersediaan per kapita. Jumlah penyediaan harus sama dengan jumlah penggunaan. Komponen penyediaan meliputi produksi (masukan dan keluaran), perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), tercecer, penggunaan lain dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi ini kemudian dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita (kg/th dan gr/hr), ketersediaan energi (Kal/hr), ketersediaan protein (gr/hr), dan ketersediaan lemak (gr/hr). Adapun penjelasan dan definisi komponen-komponen tersebut adalah

Jenis Bahan Makanan (Kolom 1)

Jenis bahan makanan yang dicakup dalam NBM meliputi bahan makanan yang bersumber dari nabati maupun hewani dan lazim dikonsumsi oleh penduduk. Bahan makanan tersebut dikelompokkan menjadi 11 kelompok menurut jenisnya, dan diikuti prosesnya mulai dari saat diproduksi sampai dengan dapat dipasarkan atau tersedia untuk dikonsumsi penduduk, dalam bentuk asal maupun bentuk turunan. Bahan makanan turunan tersebut dapat masuk ke dalam satu kelompok bahan makanan yang sama atau yang berbeda dengan jenis bahan makanan asalnya. Cakupan bahan makanan setiap kelompok pada NBM Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berbeda dengan NBM Nasional. Hal ini sangat dipengaruhi oleh potensi wilayah dalam produksi dan pola konsumsi bahan makanan. Rincian jenis bahan makanan pada setiap kelompok ada 11 jenis yaitu meliputi padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, serta minyak dan lemak

Produksi

Produksi adalah jumlah keseluruhan masing–masing bahan makanan yang dihasilkan, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- a) **Masukan (Kolom 2)** Masukan adalah produksi masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut.
- b) **Keluaran (Kolom 3)** Keluaran adalah produksi keseluruhan hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan produksi masukan, maupun hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan memproduksi yang belum mengalami perubahan. Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan faktor konversi.

Stok dan Perubahan Stok (Kolom 4)

Stok adalah sejumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah atau swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang, yang dimaksudkan sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu – waktu diperlukan. Data stok yang digunakan adalah data stok awal dan akhir tahun.

Perubahan stok adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok ini hasilnya bisa negatif (-) dan bisa positif (+). Makna negatif (-), berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar, dengan demikian komoditas yang beredar di pasar bertambah. Makna positif (+), berarti ada peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar, dengan demikian komoditas yang beredar di pasar menjadi menurun.

Impor (Kolom 5)

Impor adalah sejumlah bahan makanan, baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang didatangkan/masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan, atau disimpan. Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang termasuk impor adalah:

- a) Bahan makanan yang didatangkan/masuk dari luar wilayah Negara Republik Indonesia langsung ke dalam wilayah daerah yang bersangkutan; dan atau
- b) Bahan makanan yang didatangkan/masuk dari wilayah daerah administratif lain ke dalam wilayah daerah administratif yang bersangkutan (perdagangan antar pulau atau antar provinsi).

Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor (Kolom 6)

Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor.

Ekspor (Kolom 7)

Ekspor adalah sejumlah bahan makanan, baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang dikeluarkan/keluar dari wilayah Republik Indonesia. Untuk penghitungan NBM Regional/ Provinsi, yang termasuk ekspor adalah:

- a) Bahan makanan yang dikeluarkan/keluar dari suatu wilayah daerah administratif langsung ke luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan atau
- b) Bahan makanan yang dikeluarkan/keluar dari suatu wilayah daerah administratif ke wilayah daerah administratif lain (perdagangan antar pulau atau antar provinsi).

Penyediaan Dalam Negeri (Kolom 8)

Penyediaan Dalam Negeri adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi keluaran (output) dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor.

Pemakaian Dalam Negeri (Kolom 9-15)

Pemakaian Dalam Negeri adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di dalam negeri/daerah untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industri makanan dan bukan makanan, yang tercecer, penggunaan lain dan yang tersedia untuk atau dikonsumsi masyarakat

a) Pakan (Kolom 9)

Pakan adalah sejumlah bahan makanan yang langsung diberikan kepada ternak peliharaan baik ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun ikan.

b) Bibit/Benih (Kolom 10)

Bibit adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi. c. Diolah untuk Makanan (Kolom 11) Diolah untuk makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industri makanan dan hasilnya dimanfaatkan untuk makanan manusia dalam bentuk lain.

Diolah untuk Bukan Makanan (Kolom 12)

Diolah untuk bukan makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri bukan untuk makanan manusia, termasuk untuk industri pakan ternak/ikan.

Tercecer (Kolom 13)

Tercecer adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak sengaja mulai dari panen, pengolahan pasca panen, penyimpanan, pendistribusian hingga tersedia di pasar.

Penggunaan lain (Kolom 14)

Penggunaan lain (Other Uses) adalah bahan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan turis, pengungsi, sekolah/asrama/pesantren, stok masyarakat dan swasta, serta penggunaan industri non pangan yang besaran jumlahnya belum diketahui karena data penggunaannya tidak tersedia.

Bahan Makanan (Kolom 15)

Bahan makanan adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu negara atau daerah, termasuk pada tingkat pedagang pengecer dalam suatu kurun waktu tertentu. Bahan makanan yang dimaksud dapat tersedia dalam bentuk asal maupun turunan/olahannya. Misalnya beras yang tersedia dalam bentuk nasi maupun olahannya seperti tepung beras, bihun, dan makanan olahan lain berbahan baku beras.

Ketersediaan Per Kapita

Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura (kolom 16 dan 17) maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kalori (Kolom 18)

Kalori adalah satuan energi yang dinyatakan dalam unit panas atau dengan kata lain kalori adalah jumlah energi yang dihasilkan oleh makanan ketika dibakar dalam tubuh. Energi sangat diperlukan untuk aktivitas tubuh seluruhnya.

b) Protein (Kolom 19)

Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur nitrogen, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan – jaringan yang rusak/aus.

c) Lemak (Kolom 20)

Lemak adalah salah satu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai tempat penyimpanan energi, protein, dan vitamin.

d) Vitamin

Vitamin adalah salah satu unsur zat makanan yang diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. e. Mineral Mineral adalah zat makanan yang diperlukan manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik.

Namun sampai saat ini, data yang disajikan baru mencakup ketersediaan per kapita untuk energi, protein, dan lemak. Jumlah ketersediaan per kapita dalam NBM hanya menunjukkan rata-rata yang tersedia bagi penduduk secara keseluruhan dan tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dikonsumsi oleh penduduk. Jika ketersediaan per kapita ini digunakan sebagai perkiraan konsumsi per kapita maka penting untuk memperhitungkan bahwa ada perbedaan antara tingkat ketersediaan dan tingkat konsumsi.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan NBM ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Dinas Perindustrian / Perdagangan dan Dinas Kesehatan.

2. Metode Penghitungan NBM

a. Penyediaan (Supply)

Penyediaan (supply) suatu komoditas bahan makanan diperoleh dari jumlah produksi dikurangi dengan perubahan stok, ditambah dengan jumlah yang diimpor dan dikurangi dengan jumlah yang diekspor. Ini berarti, komponen-komponen penyediaan terdiri atas produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Bentuk persamaan penyediaan adalah sebagai berikut:

$$TS = O - \Delta St + M - X \text{ dimana,}$$

TS = total penyediaan dalam negeri (total supply)

O = produksi

ΔSt = stok akhir – stok awal

M = impor

X = ekspor

b. Penggunaan (utilization)

Selanjutnya, total penyediaan tersebut akan digunakan untuk pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi atau pada tingkat pedagang pengecer serta penggunaan lain yang belum diketahui dengan jelas besaran penggunaannya seperti makanan turis, pengungsi, kebutuhan hotel, restoran dan catering serta industri yang tidak tercatat. Komponen-komponen tersebut merupakan komponen penggunaan (utilization). Total penggunaan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$TU = F + S + I + W + Fd + Rou$, dimana,

TU = total penggunaan (total utilization)

F = pakan

S = bibit

I = industri

W = tercecer

Fd = ketersediaan bahan makanan

Rou = Penggunaan lain

Sesuai dengan prinsip neraca maka total penyediaan bahan makanan (TS) adalah sama dengan total penggunaannya (TU), yang dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$TS = TU$$

Atau

$$O - \Delta St + M - X = F + S + I + W + Fd + Rou$$

c. Ketersediaan

Berdasarkan persamaan tersebut diatas, maka jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi (Fd) yaitu:

$$Fd = O - \Delta St + M - X - (F + S + I + W + Rou)$$

Untuk mendapatkan jumlah ketersediaan bahan makanan per kapita (Fd perkapita) maka jumlah bahan makanan yang tersedia dibagi dengan jumlah penduduk, yang dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Fd \text{ perkapita} = Fd / \sum \text{penduduk}$$

Informasi ketersediaan per kapita masing – masing bahan makanan ini disajikan dalam bentuk kuantum (volume) dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kkal energi, gram protein, dan gram lemak.

d. Tantangan Dalam Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Diperlukan data yang akurat dan metodologi yang sesuai. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyusunan NBM nasional ataupun daerah antara lain:

1. Data produksi untuk komoditas tertentu masih ada yang belum tersedia, sehingga penghitungan neraca dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka konsumsi rumah tangga dan pengisian tabel NBM dimulai dari kolom 16 yaitu ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi per kapita (kg per tahun) dengan data angka konsumsi rumah tangga perkapita (data Susenas) ditambah 10%. Dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi di tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10% (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018).
2. Data penggunaan pakan, bibit, tercecer dan kebutuhan industri makanan beberapa komoditas masih menggunakan angka konversi hasil penghitungan yang diperoleh dari hasil kajian dan tabel input-output tahun 2010.
3. Data perubahan stok yang digunakan masih terbatas pada komoditas beras, jagung, tepung gandum, gula pasir, daging sapi, daging kerbau, telur ayam ras dan minyak goreng sawit. Data perubahan stok komoditas beras, jagung, tepung gandum, daging sapi, daging kerbau, telur ayam ras hanya berasal dari stok pemerintah. Perubahan stok gula pasir berasal dari

data yang ada di gudang pabrik gula milik BUMN dan swasta. Perubahan stok minyak sawit berasal dari data di gudang pabrik pengolahan minyak sawit.

4. Data bahan makanan yang diolah untuk industri bukan makanan hanya terbatas pada industri besar dan sedang. Data bahan makanan yang diolah untuk industri kecil belum dimasukkan, dikarenakan data belum tersedia.
5. Data industri bukan makanan hanya terbatas pada bahan makanan tertentu seperti beras, jagung, gandum, tepung gandum, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula mangkok, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kelapa daging, kopra, pisang, kentang dan minyak goreng
6. Beberapa data yang dicakup dalam publikasi ini memiliki time-lag dua tahun, terutama data industri.
7. Sejumlah angka konversi yang digunakan sudah terlalu lama (lebih dari dua dekade) dan belum pernah diperbaharui.
8. Pendekatan yang digunakan untuk menyusun Neraca Bahan Makanan adalah single balancing, dimana bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi dihitung sebagai sisa dari penyediaan dalam negeri setelah ekspor dikurangi dengan penggunaan untuk bibit, pakan, industri dan lain-lain. Dengan pendekatan ini, seluruh error dimasukkan ke dalam kolom bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi meskipun sudah ditambahkan komponen penggunaan lain. Hal ini dapat menyebabkan over estimasi dari komponen pangan yang tersedia untuk dikonsumsi (kolom 16), yang nantinya digunakan untuk menghitung ketersediaan energi per kapita per hari.

SIMPULAN

1. Sistem Ketahanan Pangan bagi suatu daerah merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, yang pada gilirannya merupakan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
2. Sistem Ketahanan Pangan dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatnya melalui ketahanan pangan.
3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan salah satu indikator yang mengkategorikan suatu Negara atau daerah tahan tidaknya terhadap pangan, sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi untuk selanjutnya dijadikan dasar perencanaan dalam pembangunan ketahanan pangan, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif.
4. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) bersifat dinamis dan dilakukan update setiap tahun untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah.
5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan.
6. Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan perkiraan ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk energi, protein, serta lemak di suatu daerah baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota.
7. Ketersediaan energi, protein, serta lemak secara total dapat diperkirakan menurun ataupun meningkat berdasarkan analisis perkiraan secara komprehensif dan per komponen sumber bahan pangan.
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan yang menggambarkan keragaman penyediaan pangan untuk setiap tahun dapat dijadikan tolak ukur meningkat atau menurunnya pola konsumsi di suatu daerah, baik tingkat provinsi ataupun Kabupaten / Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- Global Food Security Index. 2017. *Measuring Food Security and The Impact of Resources Risks*. Dupont (GB): London.
- Indeks Ketahanan Pangan. 2020. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
- International Food Policy Research Institute. 2014. *Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger*. Washington DC (US): IFPRI.
- Khan REA and Gill AR. 2009. *Determinants of food security in rural areas of Pakistan*. MPRA Paper No. 17146.
- Lubis R. 2010. *Analisis wilayah rawan pangan dan gizi dalam perspektif perencanaan wilayah (studi kasus Bogor)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Neraca Bahan Makanan Indonesia. 2020. *Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik*.
- Syuryadi N., Martianto D., dan Sukandar D. 2020. *Pengembangan Metode Evaluasi Komitmen Ketahanan Pangan Dan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia*. Amerta Nutrition. Jointly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga.
- The Economist Intelligence Unit. 2016. *Global Food Security Index 2016 an Annual Measure of The State of Global Food Security*. Dupont (GB): London.
- Wiranthi PE, Suwarsinah HK and Adhi AK. 2002. *Determinants of household food security: a comparative analysis of Eastern and Western Indonesia*. Indones J Agric Sci. 15(1):17-28.
- World Health Organization. 2000. *Classification of severity of malnutrition in a community for children under 5 years of age from the management of nutrition in major emergencies*. Geneva: WHO. 2013. *Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia*. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- Food and Agriculture Organization. 2015. The causes of food insecurity in rural areas. <http://www.fao.org/docrep/003/x8406e/X8406e02.htm>.